

Tiga Pelajaran Kritis Pandemi Covid-19 dan Implikasinya Bagi Kebijakan: Perspektif Global

Three Critical Lessons of Covid-19 Pandemic and Their Implications for Policy: Global Perspective

Antonius Galih Prasetyo

Lembaga Administrasi Negara

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan pelajaran global apa yang dapat dipetik dari pandemi Covid-19 dari segi politik, ekonomi, dan lingkungan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakan metode studi literatur dengan memanfaatkan data sekunder dari buku, jurnal, berita, dan statistik yang relevan. Dari dimensi politik, pandemi menuntut negara untuk tidak berpaling kepada godaan ke arah sistem yang lebih otoriter, melainkan menguatkan sistem dan nilai demokratis yang diiringi dengan pengakuan terhadap kekuatan mandiri warga. Dari segi ekonomi, pandemi menjadi peluang untuk menjadikan negara sebagai instrumen permanen kesejahteraan rakyat melalui adopsi kebijakan pendapatan dasar universal yang membantu warga terdampak dan pekerja esensial. Dari segi lingkungan, pandemi membuka borok dari praktek agrikultur dan peternakan modern yang memfasilitasi munculnya risiko kesehatan dalam bentuk berbagai penyakit zoonosis baru. Ekososialisme ditawarkan sebagai paradigma baru dari aktivitas ekonomi yang melakukan pendekatan yang lebih adil dan harmonis terhadap lingkungan dan keselamatan manusia.

Kata Kunci: pandemi Covid-19, demokrasi, pendapatan dasar universal, pekerja esensial, ekososialisme

ABSTRACT

This article aims to answer the question of what global lessons that can be learned from the Covid-19 pandemic from the political, economic, and environmental perspective. To answer this question, the literature study method was used by utilizing secondary data from relevant books, journals, news, and statistics. From the political dimension, the pandemic demands the state not to turn to the temptation to a more authoritarian system, but to strengthen democratic system and values accompanied by the recognition of the independent power of citizens. From an economic point of view, the pandemic is an opportunity to make the state as a permanent instrument of people's welfare through the adoption of a universal basic income policy which helps the affected people and essential workers. From an environmental perspective, the pandemic shows the ulcers of modern agricultural and livestock practices that facilitate the emergence of health risks in the form of new zoonotic diseases. Ecosocialism is offered as a new paradigm of economic activity that takes a more equitable and harmonious approach to the environment and human safety.

Keywords: Covid-19 pandemic, democracy, universal basic income, essential workers, ecosocialism

A. Pendahuluan

Pandemi *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) membawa dunia ke era yang tak terbayangkan sebelumnya. Tataan normal ambruk dan cara menjalankan kehidupan sehari-hari di berbagai sektor berubah dengan drastis. Schwab & Malleret (2020) menyebut pandemi ini sebagai set ulang akbar (*the great reset*) yang memengaruhi tataan makro, mikro, dan individual sekaligus. Tidak ada negara yang luput dari jangkauannya. Sejak virus pertama kali merebak pada Desember 2019 sampai dengan 18 Juli 2021, tercatat 191 juta lebih kasus dengan jumlah kematian mencapai lebih dari 4,1 juta jiwa (https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?).

Sementara di Indonesia dalam kurun waktu yang sama, jumlah warga yang terinfeksi sebesar 2,87 juta dengan jumlah kematian lebih dari 73.000 jiwa (<https://covid19.go.id/>). Data tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan peringkat pertama di Asia Tenggara dan peringkat ketiga di Asia dalam hal jumlah kematian. Pada saat tulisan ini dibuat, Indonesia sedang berada di tengah gelombang kedua pandemi dan menjadi episentrum pandemi di Asia menggantikan India (Maulia, 2021).

Selain dampak yang menyakitkan, di sisi lain pandemi juga membawa pelajaran tersendiri. Sepanjang sejarah, krisis seringkali menjadi momen titik balik yang memicu lentingan ke arah kemajuan jika suatu mekanisme penanggulangan yang tepat dapat dirumuskan dan dijalankan (Diamond, 2019). Pandemi adalah salah satu momen yang dapat mengantarkan pada perubahan zaman. Pascawabah Kematian Hitam yang melanda Eropa antara tahun 1347-1352 dan menewaskan 25-30 juta orang misalnya, masyarakat Eropa mengalami peralihan dari abad pertengahan yang

dikuasai oleh nalar teologis dan supranatural ke era Renaisans yang mengagungkan rasionalitas dan memicu kemajuan sains (Lal, 2020). Momen Covid-19 saat ini juga memberikan kesempatan yang sama untuk melakukan transformasi. Bahkan jika kehidupan pada akhirnya kembali ke situasi normal, keadaan tidak akan sama dengan sebelum pandemi terjadi karena umat manusia harus belajar menjalani kehidupan yang jauh lebih rentan dengan ancaman konstan (Žižek, 2020a).

Untuk melakukan transformasi, ditarik pelajaran dari pandemi yang terjadi. Terdapat studi yang membahas pelajaran yang ditarik dari pandemi Covid-19 dalam konteks berbagai negara seperti Amerika Serikat (Wellenius dkk., 2021), Italia (Ruiu, 2020), Jerman (Naumann dkk., 2020), China (Chen & Yu, 2020), Korea Selatan (Lee & Lee, 2020), Jepang (Sayeed & Hossain, 2020), Iran (Tabari, Amini, & Moosavi, 2020), Thailand (Intawong, Olson, & Charialertsak, 2021), Turki (Cakir, 2020), Australia (Andrikopoulos & Johnson, 2020), dan kuartet empat negara Yunani, Islandia, Selandia Baru, dan Singapura (Fouda dkk., 2020). Sementara itu, studi mengenai pelajaran pandemi dalam konteks global juga telah dilakukan dalam berbagai perspektif, misalnya perspektif medis (Fang dkk., 2020), dilema etis (Khoo & Lantos, 2020), rantai nilai (Zhu, Chou, Tsai, 2020), *infodemic* dalam media sosial (Marin, 2020), lingkungan binaan (Megahed & Ghoneim, 2020), dan fenomena bekerja dari rumah (Bolisani dkk., 2020).

Berbeda dari studi-studi sebelumnya, tulisan ini berusaha untuk menguraikan tiga pelajaran penting dan kritis dari momen pandemi Covid-19 dari perspektif global dalam tiga dimensi, yakni politik, ekonomi, dan lingkungan. Ketiganya merupakan dimensi-dimensi

yang memengaruhi kehidupan manusia secara mendalam sekaligus paling relevan dalam konteks pandemi. Sebagaimana akan diuraikan, melalui momen pandemi, kaitan erat antara ketiga dimensi tersebut dapat ditunjukkan. Pelajaran berharga hanya akan ditarik apabila interkoneksi tersebut, berikut implikasinya bagi kebijakan, dapat dieksplisitkan secara analitis.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, tulisan ini mengangkat permasalahan sebagai berikut: pelajaran global apa yang dapat dipetik dari pandemi Covid-19 dari dimensi politik, ekonomi, dan lingkungan? Meskipun pelajaran yang diuraikan di sini bersifat global, setiap negara secara khusus, termasuk Indonesia, dapat mengontesktualisasikan poin-poin pelajaran yang didapat sesuai dengan konteks negara masing-masing. Bagi tiap-tiap negara, pengalaman pandemi secara bersamaan menimbulkan pengalaman yang sifatnya universal sekaligus spesifik: virus menyebar dan menginfeksi dengan cara yang sama dan menyebabkan disrupsi dalam bidang politik, ekonomi, dan lingkungan tanpa kecuali, namun derajat dampak dan strategi mengatasinya berbeda-beda antarnegara.

C. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) dalam rangka menelaah pelajaran penting terkait pandemi Covid-19 dalam dimensi politik, ekonomi, dan lingkungan. Karena sifatnya sebagai studi literatur, maka data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder didapatkan dari berbagai buku, jurnal, artikel, laporan wawancara, berita, dan infografik yang relevan dengan kepentingan pembahasan. Untuk mendapatkan level analisis yang berkualitas, berbagai data tersebut

direfleksikan dan diabstraksikan lebih lanjut, juga dikaitkan dan didialogkan satu sama lain untuk menunjukkan keterhubungan antar isu.

D. Pembahasan

Politik: Menjawab Tantangan terhadap Demokrasi

Secara politik, tantangan terbesar pandemi terkait kepercayaan kepada demokrasi sebagai sistem politik yang paling ideal. Respons politik dari berbagai negara menunjukkan pola dimana pandemi menjadi dalih untuk memperkuat pengawasan dan kontrol warga. Pada permukaan, pendekatan koersif tersebut memang logis karena itulah satu-satunya cara mencegah penularan virus. Imbauan menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, dan mencegah bepergian mereduksi sosialitas dan interaksi warga pada level ekstrem. Berbagai perangkat teknologi dan biopolitik seperti CCTV, pengukur suhu tubuh, dan sensor dimanfaatkan oleh negara untuk melakukan pelacakan dan mitigasi (Harari, 2020).

Hal ini terbukti efektif pada negara dengan sentralisasi yang tinggi dan derajat otoritarian yang kuat seperti China. Tidak lama setelah pandemi disadari, dilakukan kuncitara (*lockdown*) terhadap Wuhan yang merupakan lokasi *ground zero*. Kota dan Provinsi Wuhan ditutup sama sekali dari dunia luar dalam suatu keputusan mendadak dari pusat tanpa pemberitahuan sebelumnya ke warga. Polisi melakukan pencarian dari rumah ke rumah, memindahkan warga dalam jumlah besar ke pusat karantina sementara, mengerahkan *drone* pengawas, dan membungkam para pemrotes (Lal, 2020).

Di seluruh negara, demi mengidentifikasi warga yang terinfeksi sekaligus melacak pergerakan dan interaksinya, gawai warga dimonitor secara ketat, ratusan juta kamera pengenalan

wajah diaktifkan, warga diwajibkan untuk mengecek dan melaporkan suhu badan dan kondisi medis, dan berbagai aplikasi untuk memperingatkan warga yang pernah berdekatan dengan pasien terinfeksi dibuat (Harari, 2020).

Kemudian setelah kota-kota di China mulai dibuka kembali, sistem pengawasan yang selama ini telah berlaku melalui apa yang disebut sistem kredit sosial diaplikasikan untuk menangkai penyebaran infeksi. Sebelum dibolehkan untuk masuk ke toko misalnya, warga harus menunjukkan warna hijau di ponsel mereka yang mengindikasikan bahwa dia tidak berdekatan dengan orang yang terkonfirmasi positif dalam dua minggu terakhir (Eckhardt, 2020).

Pendekatan tersebut diyakini tidak dapat dilakukan di kota-kota yang berada di negara demokrasi bukan pertama-tama karena negara tidak memiliki kapasitas dan sumber daya untuk melakukannya, namun karena diskursus kebebasan dan demokrasi yang kuat mengakar di negara tersebut membuat warga tidak dapat serta-merta patuh pada perintah negara dari atas. Bahkan, diskursus kebebasan itu menyebabkan penularan bertambah parah karena warga merasa memiliki kebebasan dan hak untuk mempropagandakan antimasker dan berbagai hoaks terkait Covid-19. Indonesia merupakan bagian dari negara yang tergolong dalam karakter kedua ini. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, bahkan secara eksplisit pernah menyatakan bahwa status Indonesia sebagai negara demokrasi menghalanginya melakukan kuncitara (Mietzner, 2020).

Dalam konstelasi di atas, terdapat ketegangan yang dilematis antara negara yang memberangus kebebasan warga tapi efektif mengontrol pandemi dan negara yang mempertahankan kebebasan warga namun lemah melawan pandemi. Secara khusus, dilema tersebut adalah ujian berat

bagi sistem politik demokratis, di mana hak dan kebebasan pribadi warga negara terpaksa dinegosiasikan dan juga dipertimbangkan ulang dalam berbagai segi: hak warga berpindah dikontraskan dengan ancaman penularan virus, hak warga berpendapat dilawankan dengan kebebasan menyebarkan informasi bermutu rendah (berita palsu, hoaks, dan teori konspirasi), pembatasan atau pelarangan aktivitas beribadah disanggah hak warga menjalankan ibadah seturut keyakinannya dan pengawasan ketat melalui berbagai teknologi bertentangan dengan asas menghargai privasi setiap warga (Suryajaya, 2020b).

Pemerintah China mengungkapkan bahwa kemampuan negaranya dalam mengatasi pandemi terkait erat dengan sistem politik yang dianutnya. Fakta bahwa berbagai teknologi pengawasan canggih seperti monitoring biometrik, kamera CCTV, drone pengawas, dan berbagai aplikasi pelaporan tersedia secara meluas, maka tidak ada hambatan teknologis untuk mengikuti langkah kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah China tersebut.

Berbagai negara demokrasi kini mengundang berbagai peraturan darurat dengan menggunakan pandemi sebagai dalih. Pada pertengahan Juni tahun lalu, pelacakan digital telah diterapkan di 35 negara, dengan 28 di antaranya memanfaatkan aplikasi pelacakan kontak (Lal, 2020).

Meskipun dinyatakan sebagai langkah darurat sementara, tidak menutup kemungkinan bahwa langkah tersebut diberlakukan secara permanen dengan alasan bahwa berbagai bahaya, mulai dari pandemi baru sampai terorisme, masih berpotensi mengintai.

Ancaman lain terhadap demokrasi yang dipicu pandemi adalah kemungkinan menguatnya gelombang pasang populis-

me, platform politik yang membagi masyarakat ke dalam elite yang korup dan rakyat yang baik. Di Eropa, kaum populis di berbagai negara telah mempolitisasi isu Covid-19 dalam berbagai cara untuk kepentingan mereka. Momen pandemi menjadi kesempatan bagi kaum populis meluncurkan berbagai agendanya, baik yang klasik seperti mengontrol perbatasan dan kaum migran serta melawan elit ilmiah dan farmasi maupun yang terkait pandemi seperti pembatasan kebebasan publik dan dukungan terhadap teori konspirasi (Bobba & Hubé, 2021).

Tidak ada satu pun negara yang aman sampai semuanya aman. Sayangnya, apa yang sekarang mendominasi adalah sikap “setiap negara untuk dirinya sendiri” (Žižek, 2020a). Ini dapat terlihat dari fenomena negara-negara kaya yang memborong vaksin untuk warganya sendiri, tanpa mempedulikan banyak negara miskin dan berkembang yang tidak mampu membeli vaksin (Fox, 2021).

Demikian pula, keyakinan bahwa hanya negara otoriter yang mampu menangani pandemi secara efektif sesungguhnya merupakan hal yang menyesatkan. Beberapa negara demokratis terbukti mampu menangani krisis dengan sama baiknya. Korea Selatan misalnya, mampu mengontrol pandemi dengan bertumpu kepada strategi yang memadukan pendidikan publik, tes massal, penyaringan penumpang di bandara, dan mobilisasi warga. Semuanya itu dilakukan tanpa mengorbankan kebebasan demokratis. Apa yang dilakukan di Korea Selatan juga dilakukan dengan sedikit variasi di negara-negara lain seperti Vietnam, Thailand, Singapura, Taiwan, dan Selandia Baru (Lal, 2020).

Prasyarat yang dibutuhkan agar warga patuh dan bekerja sama tanpa koersi dari atas bukanlah negara yang otoriter dan terpusat, melainkan eksistensi masyarakat yang memiliki kepercayaan

kepada otoritas publik, data ilmiah, dan media kredibel (Harari, 2020).

Dengan demikian, momen pandemi bukanlah ancaman untuk melemahkan komitmen demokratis yang dianut suatu negara. Di Indonesia, kemunduran demokrasi merupakan faktor yang menjelaskan mengapa performa penanganan pandemi kalah dari negara-negara lain (Mietzner, 2020a). Kepuasan publik terhadap kinerja demokrasi dan dukungannya terhadap sistem demokrasi mengalami penurunan berarti selama pandemi (SMRC, 2020).

Secara khusus, Mietzner (2020b) menyoroti mengenai berkembangnya wacana populisme serta perspektif developmentalisme sebagai biang dari buruknya penanganan pandemi. Dominannya kedua wacana tersebut membuat pemerintah memprioritaskan pertimbangan ekonomi di atas hal lain, termasuk kesehatan publik.

Sekuritisasi penanganan pandemi dengan mengerahkan tentara juga menjadi symptom lain dari penanganan non-demokratis yang dilakukan pemerintah (Fealy, 2020), meskipun hal itu sudah terlalu terlambat karena baru diputuskan setelah Indonesia berada di tengah-tengah pandemi (Mietzner, 2020b).

Tentara justru memanfaatkan momen pandemi untuk memajukan kepentingannya demi memperluas misinya di luar pertahanan nasional (Honna, 2020). Pandemi dikhawatirkan akan memperburuk tren kemunduran demokrasi yang telah terjadi, misalnya melalui penangkapan warga yang bersuara kritis terhadap cara pemerintah menangani pandemi (Fealy 2020).

Tren resentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat (Morris, 2020) juga harus dikawal agar tidak menjadi hal yang berkelanjutan karena melanggar asas desentralisasi dan pembagian kekuasaan

yang inheren pada demokrasi. Semua gejala kemunduran demokrasi tidak boleh dibiarkan karena hanya negara dengan mekanisme demokratis yang kuatlah yang lebih berpeluang melahirkan kebijakan yang responsif, komprehensif, dan berbasis ilmu (Mietzner, 2020a).

Di sisi lain, demokrasi hanya akan berkembang jika warganya kuat. Melalui pandemi, kekuatan warga di banyak negara terbukti melalui aktivitas saling membantu antarwarga. Di Indonesia, masyarakat melakukan berbagai aktivitas menambal keterbatasan negara seperti melakukan kuncitara mandiri, memproduksi masker, dan mendirikan dapur darurat (Varagur, 2020).

Untuk menjamin agar mereka yang terdampak bisa memenuhi kebutuhan pangan, berbagai inisiatif kewargaan dibentuk. Misalnya, petani di Kulon Progo menyumbangkan panen sayuran dan berinisiatif membuka dapur umum di Yogyakarta dan publik memberikan saweran bagi kaum miskin kota di Jakarta untuk membeli beras dari petani di Pegunungan Kendeng (Batubara, 2020).

Berbagai aplikasi dimanfaatkan menyalurkan bantuan bagi warga yang membutuhkan. Mobilisasi akar rumput berbasis modal sosial inilah yang menghindarkan Indonesia dari dampak pandemi lebih buruk (Mietzner, 2020b).

Kekuatan warga telah menggoda sebagian pengamat untuk memikirkan masyarakat alternatif di luar negara-bangsa yang mengaktualisasikan dirinya dalam bentuk solidaritas dan kerja sama global (Žižek, 2020a).

Dengan berkaca kepada pengalaman Inggris di mana respons pemerintah terhadap pandemi membuat kelas pekerja semakin menderita. Preston & Firth (2020) mensugestikan suatu sistem aktivitas saling bantu antarwarga yang dilandaskan pada prinsip anarkis.

Namun, sesungguhnya kehadiran negara yang efisien dan dapat dipercaya kini justru lebih dibutuhkan daripada sebelumnya. Organisasi kewargaan hanya dapat bekerja secara maksimal dalam kombinasi dengan aparatur negara dan para ilmuwan (Žižek, 2020b), misalnya dengan kerja sama antara institusi kesehatan dengan komunitas lokal untuk memberikan perawatan bagi warga terinfeksi (Žižek, 2020a).

Ekonomi: Melampaui Pertumbuhan, Menuju Utopia

Dampak ekonomi merupakan dampak yang paling menonjol dari pandemi Covid-19 karena hal inilah yang paling terasa dalam kehidupan sehari-hari. Karena pandemi menghentikan banyak aktivitas ekonomi, praktis hampir seluruh sektor perekonomian terpuruk. Pandemi menyebabkan resesi global terburuk sejak Perang Dunia II (Blakeley, 2020). Dampaknya bahkan hampir menyamai Depresi Besar 1929-1930 yang merupakan salah satu krisis ekonomi terburuk sepanjang sejarah (<https://www.straitstimes.com/business/economy/echoe-of-great-depression-as-australian-jobless-queue-for-help>).

Di Indonesia, dampak ekonomi pandemi tidak kalah buruk. Sepanjang 2020, pertumbuhan ekonomi berkontraksi atau minus 2,07 persen, jumlah pengangguran bertambah 2,67 juta orang menjadi 9,77 juta orang, jumlah penduduk miskin bertambah 2,76 juta orang menjadi 27,5 juta orang, dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita turun dari 59,1 juta pada 2019 menjadi Rp 56,9 juta pada 2020 yang menyebabkan Indonesia turun kelas sebagai negara berpendapatan menengah rendah (Rizky, 2021).

Demi kepentingan menyelamatkan pertumbuhan ekonomi, pembela tatanan ekonomi lama bahkan rela jika semua orang di dunia terinfeksi virus agar

kekebalan kelompok segera terbentuk dan masalah selesai. Banyaknya orang yang meninggal adalah harga yang harus dibayar demi pemulihan ekonomi (Baragona, 2020).

Dalam pandemi, meruyak sesat pikir di mana nyawa dan kesehatan publik dikesampingkan demi menyelamatkan ekonomi (Schwab & Malleret, 2020), padahal ekonomi hanya dapat dijalankan oleh manusia yang sehat. Hal ini dapat diamati pada kebijakan yang diambil oleh berbagai negara, termasuk Indonesia.

Pada akhir Februari 2020, ketika semua negara tetangga telah dilanda oleh ancaman virus, pemerintah Indonesia justru menghimbau untuk memaksimalkan kegiatan konferensi di dalam negeri dan meningkatkan promosi wisata untuk pasar wisatawan mancanegara (<https://twitter.com/setkabgo.id/status/1233591447997149184>).

Untuk tujuan itu, pemerintah pun menggelontorkan dana 72 miliar bagi para *influencer* (Batubara, 2020). Ketika kasus pertama kemudian terkonfirmasi pada Maret 2020, baru kemudian pemerintah mulai membunyikan alarm, namun itu sudah terlambat.

Diskursus mengenai *new normal* dan strategi protokol kesehatan dipilih karena kekhawatiran mengenai dampak ekonomi yang mungkin timbul jika pemerintah memilih tindakan yang lebih tegas berupa kuncitara, seperti berhenti totalnya aktivitas ekonomi masyarakat dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menanggung kebutuhan warga yang diwajibkan berdiam di rumah. Bersamaan dengan krisis ekonomi, kecenderungan baru yang muncul adalah semakin kuatnya peran negara dalam ekonomi. Pemerintahan yang besar akan kembali muncul (Schwab & Malleret, 2020).

Dalam pandemi, terbukti bahwa negara-negara neoliberal yang dicirikan oleh minimnya peran negara seperti Amerika dan Inggris berkinerja lebih buruk daripada negara-negara kesejahteraan seperti Denmark dan Norwegia. Ini karena negara neoliberal telah kehilangan kapasitasnya untuk memberikan pelayanan sosial secara langsung kepada warga (Du Gay, 2020).

Di negara yang tidak melakukan investasi memadai untuk kesehatan publik, hanya orang kaya yang mampu mengakses pelayanan kesehatan dan kaum miskin menderita dampak paling parah (Lal, 2020). Maka tak heran jika kini negara menjadi entitas ekonomi terkuat.

Di banyak negara telah diwacanakan nasionalisasi sektor-sektor yang terkait langsung dengan pandemi agar penanganan menjadi lebih terkontrol seperti rumah sakit, transportasi, dan farmasi. Ini dilakukan oleh negara-negara yang sebelumnya tak terbayangkan untuk melakukan hal ini seperti Amerika Serikat, Spanyol, Irlandia, dan Prancis. Nasionalisasi ini berpotensi meluas ke sektor-sektor lain yang terdampak pandemi (Suryajaya, 2020a).

Namun, pembesaran peran negara tak serta-merta akan membuat negara menjadi lebih sosialis. Blakeley (2020) berpendapat bahwa krisis ini justru akan membawa dunia ke era kapitalisme monopoli yang ditandai dengan jatuhnya ekonomi korporasi ke lengan negara dan menguatnya kekuasaan raksasa teknologi.

Skema-skema kebijakan ekonomi yang diciptakan negara bukan ditujukan untuk menolong mereka yang paling rentan selama krisis, melainkan ditujukan untuk redistribusi aset dan kekayaan ke kaum oligarki yang terdiri atas politisi, bankir, dan kaum korporat. Di Amerika, Kongres meloloskan paket stimulus 2 triliun dollar, termasuk kepada bisnis yang

kehilangan pendapatan besar. Sementara itu, bank sentral (The Fed) terus membeli aset-aset keuangan untuk mengamankan pasar finansial dari risiko. Dalam prakteknya, ini berarti bahwa utang korporasi dijamin negara tanpa menghiraukan kelayakan kredit dan reputasi dari korporasi dalam catatan lingkungan dan pemenuhan hak pekerja. Skema ini menunjukkan kesenjangan yang mencolok: biaya dan risiko dari bisnis korporasi diganti melalui dana talangan yang menggunakan uang pajak, namun keuntungan dari bisnis mengalir secara eksklusif kepada elite korporasi (Blakeley, 2020).

Sementara di Indonesia, pandemi juga secara ironis memperlebar kesenjangan ekonomi. Di tengah peningkatan jumlah pengangguran dan orang miskin, harta kelompok kaya juga meningkat sebagaimana diindikasikan dari data peningkatan jumlah simpanan masyarakat pada bank umum, di mana kenaikan terbesar adalah pada rekening dengan nominal lebih dari lima miliar rupiah sebanyak 14,73 persen. Data lain dari Credit Suisse menunjukkan bahwa penduduk dengan kekayaan bersih 1 juta dollar atau lebih di Indonesia meningkat dari 106.215 orang pada tahun 2019 menjadi 171.740 pada tahun 2020 (Rizky, 2021)

Pemujaan terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa pertimbangan terhadap kualitas pemerataannya merupakan obsesi yang tidak layak untuk diteruskan. Apa yang terjadi di China, dimana diumumkan bahwa ketika epidemi berakhir orang harus bekerja bahkan pada akhir pekan untuk mengejar ketertinggalan (Žižek, 2020a) adalah contoh dari cara pikir lama yang tidak belajar dari pandemi. Lebih jauh, negara juga harus lebih menempatkan dirinya sebagai instrumen untuk menguatkan yang lemah alih-alih yang kuat. Dalam konteks pandemi,

negara perlu meninggalkan mekanisme pasar untuk berbagai aktivitas seperti mengorganisir produksi hal-hal yang sangat dibutuhkan (masker, alat tes, vaksin, tabung oksigen) atau mengalihfungsikan hotel dan resor yang tak terpakai sebagai karantina.

Koordinasi produksi dan distribusi harus dilakukan di luar mekanisme pasar melalui solidaritas penuh tanpa syarat, yakni suatu bentuk tatanan yang sadar akan saling ketergantungan dan keunggulan tindakan kolektif berbasis bukti (Žižek, 2020a).

Krisis Covid-19 memberikan pelajaran bahwa negara harus memperhatikan mereka yang paling terdampak pandemi, yakni rakyat miskin yang daya belinya tergerus, termasuk golongan pengangguran baru dan pekerja informal yang harus bekerja di luar rumah untuk mendapatkan penghasilan. Semua negara mengalokasikan anggaran untuk memberikan bantuan terkait pandemi. Pemerintah Indonesia sendiri pada tahun ini mengalokasikan anggaran senilai Rp 744,75 triliun untuk program penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi (<https://bisnis.tempo.co/read/1484379/kasus-terus-melonjak-anggaran-penanganan-covid-19-dan-pen-naik-jadi-rp-7448-t>).

Di tengah kesadaran baru mengenai pentingnya jaminan pendapatan agar warga dapat hidup layak, diskursus mengenai pendapatan dasar universal (*Universal Basic Income*) yang biasa disingkat UBI kembali mengemuka. UBI merupakan salah satu “utopia yang realistis” dalam dunia kebijakan ekonomi (Bregman, 2017), di mana uang dengan jumlah tertentu yang cukup untuk hidup layak diberikan kepada semua individu tanpa syarat apa pun, termasuk mereka yang berpendapatan tinggi sekalipun (Van Parijs, 1992).

Pandemi menjadi momen untuk mendorong pemberlakuan UBI secara nyata. Ketika berkuasa, mantan Presiden Amerika Donald Trump bahkan mempertimbangkan untuk memberikan penghasilan dasar sebesar 1.000 dollar bagi setiap warga negara dewasa (Žižek, 2020a).

Di Brasil, koalisi organisasi masyarakat sipil telah menekan Kongres untuk memberikan pendapatan dasar kepada warga yang terdampak pandemi, antara lain sebesar 600 real per bulan untuk penganggur dan pekerja informal dan 1.200 real per bulan untuk janda. Tuntutan tersebut didasarkan pada apa yang telah berjalan di Kota Maricá, yang telah lama memberikan jaminan pendapatan dasar bagi sebagian besar warganya dan kini memberikan bantuan yang lebih agresif untuk segmen yang lebih luas bahkan sebelum kasus pertama melanda kota itu. Kemungkinan untuk memberikan jaminan pendapatan dasar secara permanen kini telah menjadi perbincangan politik arus utama di Brasil (Katz & Ferreira, 2020).

Tidak hanya membantu mereka yang dimiskinkan karena pandemi, UBI juga akan sangat membantu bagi golongan “pahlawan baru” di masa pandemi, yakni para pekerja esensial. Seruan untuk bekerja di rumah menguak adanya kesenjangan di antara kelas pekerja. Di masa pandemi, karena sebagian ranah ekonomi yang tidak bisa dikerjakan dari rumah, maka para pekerja di bidang tersebut disebut sebagai pekerja esensial. Selain para profesional kesehatan dan medis yang merawat korban di garda terdepan, juga ada orang-orang yang bekerja di pertanian, logistik, transportasi, pergudangan, sanitasi, kebersihan, dan toko kelontong. Masyarakat tidak bisa berjalan tanpa mereka. Pandemi juga menguak dunia kerja yang banyak diisi oleh para pekerja non-esensial, di mana

sebagian dari mereka melakukan pekerjaan yang tidak bermakna dan tidak berkontribusi kepada masyarakat (Graeber, 2018).

Ketika pandemi membuat mereka terpaksa tidak dapat bekerja seperti biasa, masyarakat tidak mendapatkan kerugian yang besar. Dalam masa sebelum krisis, sebagian dari pekerja esensial tersebut diremehkan sebagai tenaga kerja yang kurang penting karena dapat digantikan dengan mudah oleh barisan tenaga kerja yang menunggu untuk mendapat pekerjaan. Banyak dari golongan pekerja esensial yang justru mendapatkan imbalan paling sedikit (Kumar, 2020).

Kompensasi yang tidak sepadan dengan jasa dan risiko tersebut diberikan karena mereka dianggap terlalu miskin dan tak mempunyai daya tawar sehingga tak kuasa untuk menolak perintah untuk tetap bekerja (Lal, 2020), padahal ini tidaklah benar. Di Amerika, kelompok pekerja esensial, mulai dari pekerja pelabuhan sampai sopir bus, telah berani untuk melakukan protes dalam berbagai cara dan menuntut perusahaan agar memberikan mereka kompensasi yang lebih layak (Winant, 2020).

Sementara kaum kaya dan pekerja non-esensial dapat mengisolasi diri di rumah dengan segala fasilitasnya, pekerja esensial dituntut untuk tetap berangkat bekerja karena aktivitas yang mereka lakukan tidak bisa dilakukan secara daring. Kategorisasi sebagai pekerja esensial membawakan ambivalensi tersendiri. Di satu sisi, mereka kini diakui sebagai pekerja yang berharga. Namun di sisi lain, terutama di tempat-tempat di mana pemerintah tidak pro terhadap kelas pekerja dan serikat pekerja dilemahkan, pengakuan sebagai pekerja esensial sama artinya dengan memberikan keharusan bagi mereka untuk tetap bekerja di luar rumah dengan segala risiko yang mengancam (Kumar, 2020).

Masyarakat sesungguhnya telah memberikan pengakuan dan penghargaan bagi para pekerja esensial. Secara simbolis, penghargaan diberikan dengan bertepuk tangan dan memukul-mukul panci di balkon apartemen bersama-sama atau memuji mereka dengan lagu-lagu (Lal, 2020).

Sementara secara riil, bantuan diberikan dengan memberikan masker dan alat pelindung diri kepada para pekerja medis atau memberikan makanan gratis oleh restoran-restoran yang dipaksa tutup (Dorbian, 2020). Sekarang saatnya bagi negara dan perusahaan untuk memberikan penghargaan kepada para pekerja esensial secara lebih layak dengan menerapkan UBI dan kompensasi yang lebih besar.

Lingkungan: Dari Keserakahan Agrobisnis ke Ekososialisme

Sepanjang sejarah, patogen seperti virus terkait erat dengan dinamika interaksi manusia dengan lingkungannya. Penemuan agrikultur sebagai cara hidup baru menggantikan gaya hidup berburu meramu membawa konsekuensi lanjutan berupa penyakit zoonosis akibat interaksi manusia dengan hewan domestikasi. Pada akhirnya, mereka yang terinfeksi patogen mengembangkan imunitas terhadap penyakit tersebut. Dalam konteks persaingan antar peradaban, masyarakat yang telah mengembangkan imunitas mendapatkan keuntungan karena masyarakat tersebut bisa menaklukkan masyarakat dari peradaban lain yang belum kebal ketika mereka berinteraksi pertama kalinya (Diamond, 2003).

Namun, ceritanya berbeda dengan pandemi Covid-19. Perkembangan globalisasi menyebabkan virus Covid-19 menyebar hanya dalam hitungan minggu dari suatu tempat ke seluruh bagian dunia. Kekebalan kelompok hanya akan terbentuk melalui akselerasi vaksinasi atau jika sebagian besar warga terinfeksi.

Dimensi lingkungan dari Covid-19 terkait erat dimensi ekonomi yang telah dipaparkan sebelumnya. Pandemi seperti Covid-19 adalah biaya tersembunyi dari model pembangunan ekonomi yang dianut hari ini (Vidal, 2020).

Dari segi lingkungan, terdapat dua sumber pandemi, dan keduanya berkaitan erat dengan kapitalisme agrobisnis. Pertama adalah perambahan hutan untuk diekstrak komoditasnya atau pembukaan lahan. Korporasi agrobisnis multinasional merampas lahan hutan primer dan lahan pertanian kecil di seluruh dunia untuk meningkatkan produksi makanan dan memperbesar tingkat keuntungan. Perampasan ini mendorong deforestasi yang menyebabkan turunnya keragaman fungsional dan kompleksitas ekologi (Spectre Journal, 2020).

Laju deforestasi meningkat di seluruh dunia. Di Indonesia misalnya, dalam kurun waktu enam tahun (2015-2020), angka deforestasi mencapai 2,1 juta hektar (Katadata, 2021b). Sementara dalam rentang waktu yang lebih panjang antara tahun 2001-2019, luasan deforestasi sebanyak 26,8 juta hektar (Katadata, 2021a).

Hutan alamiah yang kompleks, lebat, dan terisolasi memerangkap patogen yang ada di dalam populasi yang berada di hutan tersebut atau sebagian kecil spesies lainnya. Setelah hutan dirambah, maka kompleksitas dari hutan menjadi hilang. Keanekaragaman hayati berkurang dan berbagai patogen yang selama ini berenang di hewan liar seperti kelelawar berpindah habitat ke tempat yang lebih berdekatan dengan manusia. Karena semakin sering bertemu dengan manusia melalui berbagai mediasi aktivitas ikutan dari pembukaan dan eksploitasi hutan seperti perkebunan, peternakan, dan perdagangan serta konsumsi hewan liar, tidak ada lagi penghalang alami antara binatang inang yang menyimpan virus dengan manusia.

Manusia pun akhirnya menjadi inang baru dari virus dan menjadi vektor untuk transmisinya (Vidal, 2020).

Sumber yang kedua adalah industri hewan ternak dan unggas. Industri semacam itu membiakkan hewan dengan cara menjejalkannya ke tempat yang padat untuk memberi makan populasi kota. Monokultur genetik dari hewan ternak tidak memiliki benteng imunitas dari patogen liar. Kepadatan populasi ternak yang besar demi output produksi yang tinggi menekan respons imun dan pada akhirnya menyebabkan tingkat penularan yang lebih tinggi jika infeksi mulai terjadi. Patogen yang sebelumnya terisolasi kemudian menyebar ke hewan ternak dan manusia. Dari sinilah asal mula penyakit zoonosis, yaitu penyakit pada binatang yang kemudian menular ke manusia dan kemudian antarmanusia. Hal ini diperparah dengan intervensi yang berupaya menggemukkan hewan ternak secara kimiawi, menjadikan hewan ternak menjadi seragam secara genetik dan lebih rentan terhadap virus. Praktik ini juga cara paling efisien memicu timbulnya patogen yang paling buruk karena tidak ada lagi penghalang imunologis yang mampu mencegah patogen untuk menyebar (Spectre Journal, 2020).

Praktik peternakan yang tidak lestari tersebut dilakukan meluas, baik di negara maju maupun berkembang. Di Indonesia, pemberian antibiotik dalam jumlah besar di peternakan ayam broiler memicu munculnya bakteri kebal obat di daging ayam dan pada akhirnya mengancam keselamatan manusia merupakan hal yang lazim (Bimantara dkk., 2021).

Dengan mengingat bahwa dimensi ekologi dari Covid-19 terkait erat dengan kapitalisme sebagai modus ekonomi paling dominan saat ini, sudah saatnya dibayangkan suatu alternatif terhadap sistem kapitalisme, khususnya sektor

agrobisnis yang tidak menghiraukan lingkungan. Jika pandemi ini berlalu dan segala sesuatunya kembali dijalankan dengan cara lama, maka itu hanya akan menunggu bencana lanjutan yang lebih besar terjadi. Perlu diingat bahwa tiga per empat dari penyakit baru yang menginfeksi manusia muncul dari binatang dan Covid-19 hanyalah puncak gunung es dari gunung patogen yang sebagian besar belum ditemukan (Vidal, 2020).

Watak dari kapitalisme adalah beralih ke tempat lain begitu sumber daya di satu tempat habis terkuras, suatu proses yang disebut Harvey (2006) sebagai *spatial fix*. Seiring dengan tingkat ekspansi perambahan yang akseleratif, saat ini hanya tersisa sedikit hutan yang tersisa untuk dieksploitasi perusahaan agrobisnis, pertambangan, dan perikanan.

Alih-alih melihat jumlah yang tersisa sedikit sebagai pendorong untuk melindungi hutan, yang lebih mungkin terjadi adalah perusahaan akan berlomba-lomba untuk memperebutkan sisa-sisa terakhir (Spectre Journal, 2020).

Menyelidiki sumber asal dari virus dan mengembangkan vaksin adalah solusi parsial dan reaktif terhadap bahaya laten pandemi (Spectre Journal, 2020). Ancangan solusi harus bersifat lebih paradigmatis dengan mengembangkan sistem baru yang menghubungkan ekonomi dan lingkungan secara lebih adil dan berkelanjutan. Dalam hal ini, ekososialisme menjadi alternatif bagi sistem kapitalisme demi mencegah bencana yang lebih besar di masa depan (Wallace, 2020).

Perambahan hutan harus dihentikan sekarang juga. Masyarakat adat dan petani skala kecil yang selama ini hidup berdampingan dengannya jangan sampai terusir karena secara turun-temurun mereka mempraktikkan agroekologi yang memelihara kelestarian

hutan. Dalam hal sistem produksi makanan, tanaman monokultur diganti dengan tanaman yang lebih beragam. Pembiakan di lokasi tempatan (*on-site breeding*) harus menjadi cara dominan dalam industri perternakan karena cara itu lebih tahan terhadap patogen. Jika populasi ternak di suatu tempat terjangkit patogen, maka akan ada beberapa yang selamat, dan populasi selamat itulah yang dibiakkan agar keturunannya lebih tahan terhadap patogen (Spectre Journal, 2020).

Cara-cara lain yang dapat dilakukan adalah menghubungkan produksi yang adil dengan sirkulasi yang adil, produksi agroekologis yang mendapatkan dukungan subsidi harga yang menuntungkan produsen dan konsumen, penguatan otonomi petani agar mereka tidak didikte lagi untuk membeli faktor produksi dari korporasi, dan sosialisasi sistem makanan yang mampu mengintegrasikan produksi makanan kepada kebutuhan komunitas setempat. Semua praktik agroekologis berwawasan ekososialisme tersebut pada akhirnya mampu melindungi lingkungan sekaligus petani dan menghubungkan kembali ekologi dengan ekonomi (Wallace, 2020).

Jika semua itu berhasil dilakukan, maka dunia diharapkan tidak hanya akan menjadi lebih siap dalam menyongsong krisis selanjutnya, namun juga mampu mencegahnya.

E. Kesimpulan

Pandemi Covid-19 merupakan salah satu momen peralihan sejarah *sui generis* yang dapat membawa kehidupan bersama ke arah yang lebih baik. Melampaui pandangan terhadap Covid-19 yang melihatnya secara reduksionis sebagai isu kesehatan publik dan epidemiologi yang berusaha dipecahkan dengan solusi teknis (karantina wilayah, protokol kesehatan, tes PCR dan antigen,

vaksinasi), tulisan ini berusaha melihatnya ke akar persoalan yang lebih mendalam pada tiga dimensi yang saling terkait: politik, ekonomi, dan lingkungan.

Dari segi politik, pandemi memberikan tantangan kepada demokrasi sebagai sebuah tata nilai maupun sistem politik. Pengalaman negara otoriter menghadapi pandemi, misal China, dipromosikan sebagai model paripaling ideal menangani krisis. Tapi sesungguhnya banyak negara demokratis yang mampu menangani pandemi dengan baik tanpa mengorbankan kebebasan demokratis. Justru dengan demokrasi, kebijakan penanganan pandemi dapat menjadi lebih akuntabel, responsif, dan berbasis bukti. Untuk itu, penguatan dan pendalaman komitmen terhadap demokrasi harus menjadi pilihan, termasuk penguatan peran warga negara. Pembuatan kebijakan yang dibarengi penghormatan terhadap pakar, pemberian kebebasan berpendapat bagi masyarakat, perluasan inklusivitas dalam lembaga publik, dan penguatan lembaga serta praktik antikorupsi.

Dari segi ekonomi, seiring terpuhnya dunia usaha, tendensi yang muncul adalah bangkitnya negara sebagai aktor yang paling berperan dalam perekonomian. Ini terlihat dari berbagai kebijakan seperti nasionalisasi sektor-sektor penting, penyelamatan korporasi, dan pemberian bantuan kepada warga terdampak. Terkait dengan pemberian bantuan, pandemi membuka momentum untuk memikirkan bentuk perlindungan sosial yang bervisi jangka panjang melalui penerapan UBI. Reduksi kesulitan ekonomi akibat krisis hendaknya tidak lagi ditangani dengan kebijakan bervisi jangka pendek seperti pemberian bantuan sosial. Pembiayaan dapat dilakukan melalui instrumen seperti pajak kekayaan (Piketty, 2014) atau pajak progresif.

Sementara dari dimensi lingkungan, Indonesia perlu menerapkan ekonomi hijau dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dengan melakukan langkah-langkah seperti penghentian deforestasi dan alih fungsi lahan produktif, melindungi masyarakat adat dan petani skala kecil, introduksi agrikultur yang lestari, melarang perdagangan hewan liar, mengembangkan dan memopulerkan daging budidaya, dan mengurangi konsumsi makanan cepat saji.

Daftar Pustaka

Buku

- Batubara, B. (2020). *Teman Rebahan: Kapitalisme dan Covid-19*. Yogyakarta: Gading.
- Blakeley, G. (2020). *The Corona Crash: How the Pandemic Will Change Capitalism*. London & New York: Verso.
- Bobba, G. & N. Hubé. (2021). "COVID-19 and Populism: A Sui Generis Crisis." Dalam G. Bobba & N. Hubé (ed). *Populism and the Politicization of the COVID-19 Crisis in Europe*. Gewerbestrasse: Palgrave Macmillan.
- Bregman, Rutger. (2017). *Utopia for Realists: The Case for a Universal Basic Income, Open Borders, and a 15-Hour Workweek*. New York: Little, Brown and Company.
- Diamond, J. (2003). *Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies*. New York: W.W. Norton.
- _____. (2019). *Upheaval: Turning Points for Nations in Crisis*. New York: Little, Brown and Company.
- Dorbian, I. (2020). "COVID-19: The Great Equalizer." Dalam L. Knorr dll. (ed). *After the Pandemic:*

Visions of Life Post COVID-19. Mechanicsburg: Sunbury.

- Du Gay, P. (2020). "Bureaucracy." Dalam A. Bradshaw & J. Hietanen (ed). *The Dictionary of Coronavirus Culture*. London: Repeater Books.
- Eckhardt, G. M. (2020). "Liquid." Dalam A. Bradshaw & J. Hietanen (ed). *The Dictionary of Coronavirus Culture*. London: Repeater Books.
- Graeber, D. (2018). *Bullshit Jobs: A Theory*. New York: Simon & Schuster.
- Kumar, A. (2020). "Essential Workers." Dalam A. Bradshaw & J. Hietanen (ed). *The Dictionary of Coronavirus Culture*. London: Repeater Books.
- Katz, P. R. & L. Ferreira. (2020). "The Solidarity Economy." Dalam D. Chasman & J. Cohen (ed). *The Politics of Care*. Cambridge, London & New York: Boston Review & Verso.
- Preston, J. & R. Firth. (2020). *Coronavirus, Class, and Mutual Aid in the United Kingdom*. Gewerbestrasse: Palgrave Macmillan.
- Schwab, K. & T. Mallert. (2020). *Covid-19: The Great Reset*. Florida: Forum Publishing.
- Wallace, R. (2020). *Dead Epidemiologists: On the Origins of COVID-19*. New York: Monthly Review Press.

Jurnal

- Fealy, G. (2020). "Jokowi in the Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and the Overbearing State." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3): 301-323.
- Honna, J. (2020). "Military Politics in Pandemic Indonesia." *The Asia-Pacific Journal*, 18(5): 1-9.

- Mietzner, M. (2020a). "Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response." *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2): 227-249.
- Van Parijs, P. (1992). "Competing Justifications of Basic Income." Dalam P. Van Parijs (ed). *Arguing for Basic Income: Ethical Foundations for a Radical Reform*. London & New York: Verso.
- Winant, G. (2020). "Coronavirus and Chronopolitics." Dalam J. Kindig, M. Krotov & M. Roth (ed). *There Is No Outside: COVID-19 Dispatches*. London & New York: Verso.
- Website**
- Baragona, J. (2020). "CNBC's Rick Santelli: 'We'd Better Off' if We Gave Everybody Coronavirus." <https://www.thedailybeast.com/cn-bcs-rick-santelli-wed-be-better-off-if-we-gave-everybody-coronavirus-and-got-it-over-with>
- Bimantara, J. G. dkk. (2021). "Penyalahgunaan Antibiotik di Peternakan Ayam Broiler." <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/07/16/>
- Fox, B. (2021). *"The Brief-The self-defeating scramble for vaccines."*
- Katadata. (2021a). "26,8 Juta Hektar Hutan Indonesia Gundul sepanjang 2001-2019." <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/20/268-juta-hektar-hutan-indonesia-gundul-sepanjang-2001-2019>.
- Maulia, E. (2021). "Indonesia overtakes India to become Asia's COVID epicenter." <https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/Indonesia-overtakes-India-to-become-Asia-s-COVID-epicenter>.
- Morris, C. (2020). *"Governing a pandemic: centre-regional relations and Indonesia's COVID-19 response."* <https://www.newmandala.org/governing-a-pandemic-centre>
- Rizky, A. (2021). "Meski Pandemi, Jumlah Orang Kaya Bertambah." <https://barisan.co/meski-pandemi-jumlah-orang-kaya-bertambah/>.
- Suryajaya, M. (2020a). "Membayangkan Ekonomi Dunia Setelah Korona." <https://www.martinsuryajaya.com/post/membayangkan-ekonomi-dunia-setelah-korona>
- Varagur, K. (2020). *"Indonesia's government was slow to lock down, so its people took charge."* <https://www.nationalgeographic.com/history/article/indonesia-government-slow-lock-down>
- Vidal, J. (2020). *"'Tip of the iceberg': is our destruction of nature responsible for Covid*